



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra), dengan menampilkan kinerja yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022. Adapun indikator pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih, khususnya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwakarta, Februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA,**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purwakarta government. The stamp contains the text 'KABUPATEN PURWAKARTA' and 'PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

**JAYA PRANOLO, S.STP,M.Si
NIP. 19780306 199612 1 001**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi tuntutan publik berupa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, maka diperlukan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan dari atasan masing-masing kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja.

Pada dasarnya LAKIP merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Kinerja Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Dimana Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta terdiri dari : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif; Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan Indikator Sasaran yang diukur kinerjanya terdiri dari : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran; Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa; dan Persentase Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan, Indikator Sasaran Strategis Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran **telah melebihi target, yaitu sebesar 111%**. Indikator Sasaran Strategis Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa **telah sesuai target, yaitu sebesar 98%**. Terakhir, Indikator Sasaran Strategis Persentase Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga **telah sesuai target, yaitu sebesar 100%**.

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada APBD Perubahan Tahun 2022 mencapai sebesar **Rp12.784.042.793,00** atau **88%** dari total anggaran yang dialokasikan yaitu **Rp14.513.882.027,00**. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan teknis pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencapai sebesar **Rp4.852.502.987,00** atau **96%** dari anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp5.080.968.357,00**. Sedangkan Realisasi untuk Program/Kegiatan Non Teknis atau Program/Kegiatan Pelaksanaan Kesekretariatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta mencapai sebesar **Rp7.931.539.806,00** atau **84%** dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar **Rp9.432.913.670,00**.

Permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan harus mendapat perhatian untuk kemudian diperbaiki pada Tahun Anggaran 2023, hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur DPMD Kabupaten Purwakarta guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama Tahun Anggaran 2022 dan harus mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum Maksimalnya Koordinasi dan Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah Dalam Hal Perencanaan Kinerja Maupun Anggaran, Serta Pengakomodiran Regulasi yang Turun di Pertengahan Periode Dokumen Perencanaan Dapat Menyebabkan Tidak Optimalnya Konsistensi Perencanaan

Antar Waktu, Sehingga Seringkali Harus Dilaksanakan Perubahan Pada Dokumen Operasionalnya.

2. Belum Optimalnya Penyediaan Data dan Informasi Untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Pelaksanaan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) di Kabupaten Purwakarta Belum Sepenuhnya Optimal, Dimana Salah Satunya adalah Masih Kurangnya Pemahaman Terhadap Pentingnya Penguatan SIDA.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I - 1 |
| 1.1 Latar Belakang | I - 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | I - 3 |
| 1.3 Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Purwakarta | I - 6 |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi DPMD Kabupaten Purwakarta | I - 9 |
| 1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi) | I - 10 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | II - 1 |
| 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | II - 1 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahunan | II - 3 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | II - 6 |
| 2.4 Rencana Penganggaran | II - 9 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | III - 1 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | III - 1 |
| 3.2 Akuntabilitas Keuangan | III - 4 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | IV - 1 |

DAFTAR ISI

| | | |
|------|--------------------------------------|---------|
| i | KATA PENGANTAR | |
| iii | RINGKASAN KESIMPULAN | |
| vii | DAFTAR ISI | |
| viii | DAFTAR GAMBAR | |
| ix | DAFTAR LAMPIRAN | |
| | | |
| 1-1 | BAB I PENDAHULUAN | BAB I |
| 1-1 | 1.1. Latar Belakang | 1.1 |
| 1-3 | 1.2. Tujuan Penelitian | 1.2 |
| 1-6 | 1.3. Ruang Lingkup Penelitian | 1.3 |
| 1-9 | 1.4. Manfaat Penelitian | 1.4 |
| 1-10 | 1.5. Metode Penelitian | 1.5 |
| | | |
| 11-1 | BAB II PEMBAHASAN KEMERDEKAAN | BAB II |
| 11-1 | 2.1. Pengertian Kemerdekaan | 2.1 |
| 11-7 | 2.2. Bentuk Kemerdekaan | 2.2 |
| 11-8 | 2.3. Tujuan Kemerdekaan | 2.3 |
| 11-9 | 2.4. Faktor-faktor Kemerdekaan | 2.4 |
| | | |
| 11-1 | BAB III ASPEK HUKUM KEMERDEKAAN | BAB III |
| 11-1 | 3.1. Pengertian Hukum Kemerdekaan | 3.1 |
| 11-1 | 3.2. Ruang Lingkup Hukum Kemerdekaan | 3.2 |
| | | |
| 11-1 | BAB IV PENUTUP | BAB IV |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----------|--|-------|---------|
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2019 - 2023 | | II - 3 |
| Tabel 2.2 | Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2022 | | II - 4 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja DPMD Tahun 2022 | | II - 7 |
| Tabel 2.4 | Program, Kegiatan dan Anggaran DPMD Tahun 2022 | | II - 9 |
| Tabel 2.5 | Program, Kegiatan dan Anggaran DPMD Pada Anggaran Perubahan Tahun 2022 | | II - 13 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Capaian Kinerja DPMD Tahun 2022 | | III - 2 |
| Tabel 3.2 | Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2022 | | III - 6 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. SOTK DPMD Kabupaten Purwakarta